



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN
PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Fungsi Substantif adalah fungsi lini yang merupakan kegiatan pokok/utama Kementerian Perdagangan.

4. Kode Klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu penyusunan tata letak arsip.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP BERDASARKAN FUNGSI FASILITATIF

- A. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
BU : BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI
DN : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
SL : SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
BP : BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
EP : EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
IP : EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
EI : FASILITASI EKSPOR IMPOR
PP : PENGAMANAN PERDAGANGAN
- C. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
SM : STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
PK : PEMBERDAYAAN KONSUMEN
BJ : PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
MR : METROLOGI
TN : TERTIB NIAGA
- D. DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PM : PERUNDINGAN MULTILATERAL
PA : PERUNDINGAN ASEAN
AO : APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
PB : PERUNDINGAN BILATERAL
PJ : PERUNDINGAN PERDAGANGAN DAN JASA

E. DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

IE : PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR

PE : PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

KP : KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR

PC : PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA

DE : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA

F. BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA DAN KOMODITI

UD : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN

PF : PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK

BP : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

PR : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS

G. KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

AD : KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

H. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

PI : KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

A. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BU.BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI

00 Kelembagaan dan Penguatan Usaha

00.00 Kelembagaan

Naskah yang berkaitan dengan perizinan, pendampingan, dan kegiatan pameran pelaku usaha.

00.01 Penguatan Usaha

Naskah yang berkaitan dengan rekomendasi kegiatan (survei, pengawasan, berita acara survei, laporan) terkait waralaba, penjualan langsung, dan rekomendasi pameran untuk penguatan usaha.

01 Jasa Perdagangan

01.00 Perdagangan berbasis elektronik

Naskah yang berkaitan dengan *e-commerce*, rapat inter/antar Kementerian, uji publik, pendaftaran *e-*

commerce, aplikasi *e-commerce* serta *workshop* berkaitan perdagangan berbasis elektronik.

01.01 Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi dan Bisnis

Naskah yang berkaitan dengan perizinan (jasa survei dan broker properti), dan sosialisasi.

01.02 Data dan Informasi Perizinan

Naskah yang berkaitan dengan perizinan (*e-commerce*, jasa informasi dan bisnis) dan kegiatan partisipasi penyusunan kebijakan internasional.

02 Usaha Dagang Asing dan Keagenan

02.00 Usaha Dagang Asing

Laporan tembusan Penerbitan Perwakilan Perusahaan Asing (PPPA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setiap 6 bulan sekali yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA), Perwakilan Perusahaan Asing (PPPA), Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA).

02.01 Keagenan

Naskah yang berkaitan dengan perizinan agen, agen tunggal, sub agen, distributor, sub distributor, distributor tunggal, jasa (dalam negeri, luar negeri) meliputi permohonan, persyaratan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran, analisa sampai dengan terbitnya surat izin.

03 Informasi Perusahaan

03.00 Pendaftaran Perusahaan

Naskah yang berkaitan dengan laporan penerbitan surat izin usaha perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan), identifikasi Sistem Informasi Perizinan *Online* (SIPO), implementasi dan pemantauannya serta bimtek SIUP/TDP, dan juga perizinan manual kartu garansi.

03.01 Analisa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP), database LKTP, termasuk data layanan LKTP kepada masyarakat dan perusahaan.

04 Pelaku Pasar

04.00 Pengecer

Naskah yang berkaitan dengan forum komunikasi serta kegiatan sosialisasi kebijakan Toko Modern.

04.01 Pemasok

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan usaha Toko Modern. Pengawasan Barang dan Jasa

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang dan jasa dibidang Sistem dan Pengawasan Distribusi Langsung dan Waralaba, Distribusi Tidak Langsung, Jasa Perdagangan, Distribusi dan Bisnis, Perdagangan berbasis Elektronik.

DN.PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

00 Iklim Usaha

00.01 Iklim Usaha Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan/pedoman bagi Usaha Kecil Menengah seperti pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sampai dengan konsep rancangan Peraturan.

00.02 Bimbingan Teknis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknitentang pengembangan pemasaran, kemasan, dan pendampingan serta fasilitasi antara lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan bagi usaha kecil dan menengah, dari surat pemberitahuan sampai dengan laporan kegiatan.

01 Fasilitas Usaha dan Pemasaran

01.00 Fasilitas Usaha Produktif

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi usaha produktif, serta surat persetujuan pemberian bantuan

sarana usaha perdagangan dalam bentuk barang yang meliputi tigerobak, tenda, *packaging*, fasilitasi halal, Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan fasilitasi usaha produktif melalui kegiatan serta fasilitasi usaha produktif melalui proposal dinas.

01.01 Pemasaran

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam bentuk *online* dan pemasaran dalam bentuk konvensional seperti kemitraan dan partisipasi pameran, kerjasama pameran dengan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi pameran dan pameran Produk Unggulan Daerah serta kerjasama dengan toko/retail modern.

02 Pengembangan Produk Lokal

02.00 Penelaah Potensi Produk

Naskah yang berkaitan dengan identifikasi produk unggulan daerah seperti permohonan data ke dinas daerah sampai dengan profil produk.

02.01 Database Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Naskah yang berkaitan dengan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan Kementerian Perdagangan dalam bentuk etalase produk Indonesia.

03 Pencitraan Produk Dalam Negeri

03.00 Kerjasama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Aku Cinta Indonesia dengan sekolah dan pelaku usaha dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada anak didik dan generasi muda/masyarakat dari surat pemberitahuan kegiatan sampai dengan laporan kegiatan

03.01 Peningkatan Promosi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri seperti televisi *Placement*, *Merchandise*, Kampanye Melalui Media Sosial/Periklanan di televisi nasional, Kampanye Cinta

Produk Indonesia yang mencakup Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Budaya, Hari Pakai Produk, Pemetaan Pola Konsumsi.

SL. SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

00 Pengembangan Sarana Distribusi

00.00 Perencanaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pasar rakyat, penyampaian proposal, reviu proposal, sampai disetujuinya pasar rakyat.

00.01 Identifikasi Sarana Distribusi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi Sarana Distribusi, baik dari pengajuan, pengecekan lapangan.

01 Pengelolaan Sarana Distribusi

01.00 Evaluasi Pengelolaan

Naskah yang berkaitan dengan survei, monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar rakyat termasuk sekolah pasar, aktivasi pasar rakyat.

02 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik

02.00 Pemerintah

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah guna terlaksananya kelancaran arus logistik antar provinsi, terluar, dan perbatasan serta konektivitas sektor perdagangan.

02.01 Informasi Logistik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan survei, monitoring, dan informasi sarana distribusi.

BP. BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING

00 Barang Kebutuhan Pokok

00.00 Hasil Pertanian dan Peternakan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan,

bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.

00.01 Hasil Industri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknism, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi gula, minyak goreng, terigu.

00.02 Hasil Perikanan Kelautan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol dan ikan cakalang.

01 Barang Penting

01.00 Hasil Industri

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialiasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi semen, besi beton, baja ringan, triplek, dan barang berbahaya (B2) dalam pengawasan.

01.01 Penunjang Pertanian dan Pertambangan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialiasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi pupuk non subsidi, pupuk bersubsidi dalam pengawasan, elpiji bersubsidi, dan benih pajale.

02 Informasi Pasar

02.00 Informasi Harga

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

02.01 Informasi *Stok*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

03 Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

03.00 Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok yang meliputi komoditi beras, kedelai, daging, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, terigu, dan ikan segar.

03.01 Hewan dan Non Serelia

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang penting meliputi benih pajale, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

EP. EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

00 Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan

00.00 Persetujuan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.

00.01 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* tentang Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.

00.02 Database Eksportir

Naskah yang berkaitan dengan database eksportir Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.

00.03 Identifikasi Komoditi Baru

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.

00.04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan, dan Peternakan.

01 Perkebunan

01.00 Penyiapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) Hasil Perkebunan.

01.01 Identifikasi Komoditi Baru

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru mengenai hasil perkebunan.

01.02 Database

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database perkebunan.

01.03 Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* mengenai perkebunan.

01.04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

02 Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-rempah

02.00 Persetujuan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.

02.01 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.

02.02 Database Eksportir

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.

02.03 Identifikasi Komoditi Baru

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.

02.04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

03 Kehutanan

03.00 Penyiapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) kehutanan.

03.01 Identifikasi Komoditi Baru

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru kehutanan.

03.02 Database

Naskahyang berkaitan dengan database kehutanan.

03.03 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* kehutanan.

03.04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kehutanan.

IP. EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

00 Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Aneka dan Jasa

00.00 Persetujuan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Aneka dan Jasa.

00.01 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Aneka dan Jasa.

00.02 Database Eksportir

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Aneka dan Jasa.

00.03 Identifikasi Komoditi Baru

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Aneka dan Jasa.

00.04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

01 Barang Kimia, Tambang, dan Limbah

01.00 Persetujuan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Barang Kimia, Tambang dan Limbah.

01.01 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan Barang Kimia, Tambang dan Limbah.

01.02 Database Eksportir

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan Barang Kimia, Tambang dan Limbah.

01.03 Identifikasi Komoditi Baru

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Barang Kimia, Tambang dan Limbah.

01.04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

EI. FASILITASI EKSPOR IMPOR

00 Peningkatan Akses Pasar

00.00 Informasi Akses Pasar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi Akses pasar internasional sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha berupa *trade facilitation*, *Focus Group Discussion*, serta forum peningkatan dan pemahaman barang strategis dan berbahaya terhadap sistem internasional, monitoring.

00.01 Imbal Dagang

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan kegiatan fasilitasi imbal dagang sesuai dengan ketentuan berupa forum dialog pembahasan masalah dagang lintas batas, monitoring.

01 Sistem Pembiayaan dan Pembayaran

01.00 Sistem Pembiayaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi sistem pembiayaan bagi pelaku usaha dalam aktifitas ekspor dan impor.

01.01 Sistem Pembayaran

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi sistem Pembayaran bagi pelaku usaha dalam aktifitas ekspor dan impor.

02 Ketentuan Asal Barang

02.00 Prosedur Ketentuan Asal Barang

Naskah yang berkaitan dengan rancangan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bidang prosedur ketentuan asal barang Indonesia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penerbit Surat

Keterangan Asal (SKA) melalui kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion*/sosialisasi/*workshop*.

02.01 Penanganan Masalah SKA

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan masalah terkait penggunaan SKA.

03 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

03.00 Transportasi dan Kepelabuhanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kelancaran arus barang di daerah/pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan, bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* (asosiasi, pelaku usaha), monitoring dan evaluasi.

03.01 Kawasan Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan pelayanan perizinan ekspor dan impor di kawasan perdagangan, bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* (asosiasi, pelaku usaha), monitoring dan evaluasi.

04 Pelayanan Ekspor dan Impor Perdagangan

04.00 Analisa Pelayanan Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis layanan ekspor impor perdagangan melalui sosialisasi/bimbingan teknis/*Focus Group Discussion*/*workshop* seperti kegiatan perizinan intrade, monitoring dan evaluasi, dan database.

04.01 Fasilitasi Pelayanan Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelayanan konsultasi ekspor dan impor perdagangan melalui sosialisasi/bimbingan teknis/*Focus Group Discussion*/*workshop* seperti kegiatan perizinan intrade, monitoring dan evaluasi, dan database, *maintenance* dan peningkatan layanan sistem dan aplikasi *online*.

PP. PENGAMANAN PERDAGANGAN

00 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan hambatan teknis perdagangan yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi/laporan pelaku usaha dari perwakilan Indonesia/kebijakan dari otoritas negara tujuan ekspor, konsultasi/pertemuan untuk penanganan di negara mitra dagang, fasilitasi penyelesaian sengketa, *Focus Group Discussion*, monitoring dan evaluasi, pencatatan riwayat penanganan kasus di profil kasus.

01 Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, *Safeguard*

Naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan dumping, subsidi, *safeguard* yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi dari negara penuduh, dokumen petisi, surat *interested parties*, dokumen kuesioner, advokasi/pendampingan teknis penanganan hambatan perdagangan, penyusunan submisi/tanggapan pemerintah, dengar pendapat, pendampingan saat *on the spot investigation*, verifikasi kasus tuduhan subsidi, dokumen *provisional measures disclosure*, dokumen *final determinaton*, penyampaian hasil.

02 Pengajuan *Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)*

Naskah yang berkaitan dengan Pengajuan DSB WTO terhadap penanganan tuduhan dumping, surat dan draft permintaan *legal opinion* ke ACWL, permintaan konsultasi, surat dirjen terkait permintaan pengajuan *dispute*, surat notifikasi dari Indonesia ke WTO, pembentukan panel (*establishment, composition*), *first written submission*, *first meeting on the panel*, *second written submission*, *second meeting panel*, *panel report issued to the parties*.

03 Database

Naskah yang berkaitan dengan database penanganan perdagangan meliputi profil kasus, dokumen terkait (petisi, submisi, *preliminary measures*, *final determination*, *legal drafting*, profil perusahaan, profil negara).

04 Bimbingan Teknis

Naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis hambatan perdagangan.

C. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

SM. STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

00 Perumusan dan Penerapan Standar

00.00 Penerapan Standar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/supervisi/fasilitasi/diseminasi/konsultasi penerapan standardisasi di bidang perdagangan, laporan kegiatan evaluasi penerapan standar.

00.01 Perumusan Standar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan konsep rancangan kebijakan standardisasi di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perdagangan.

01 Bimbingan dan Sarana Mutu

01.00 Bimbingan Mutu

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi/fasilitasi/diseminasi/konsultasi bimbingan mutu, konsep promosi dan publikasi standardisasi bidang perdagangan.

01.01 Sarana Mutu

Naskah yang berkaitan dengan konsep standar acuan mutu produk, atau komoditi sesuai dengan ketentuan, konsep informasi standar mitra tujuan ekspor, konsep promosi dan publikasi standardisasi bidang sarana mutu perdagangan.

02 Verifikasi Mutu

02.00 Verifikasi dan Pengendalian Mutu Barang Impor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dalam rangka penerbitan dokumen usulan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), kegiatan pemantauan pra pasar terhadap

mutu barang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), dokumen hasil kesepakatan kerjasama terkait verifikasi dan pengendalian mutu barang impor, kegiatan bimbingan teknis/supervisi/diseminasi/konsultasi verifikasi dan pengendalian mutu barang impor.

- 02.01 Verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dalam rangka penerbitan dokumen usulan pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan lembaga penilaian kesesuaian (LPK), dokumen usulan penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP), kegiatan pemantauan kinerja lembaga penilaian kesesuaian (LPK), kegiatan pemantauan mutu bahan olah komoditi ekspor (BOKOR) dan bahan olah karet standar Indonesia Rubber (BOKAR SIR), kegiatan bimtek/supervisi/diseminasi/konsultasi verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor, laporan kegiatan verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor.

03 Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

- 03.00 Rancangan Kebijakan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan rancangan kebijakan terkait jabatan fungsional penguji mutu barang.

- 03.01 Bimbingan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/supervisi/diseminasi/konsultasi jabatan fungsional penguji mutu barang, kegiatan rapat kordinasi terkait jabatan fungsional penguji mutu barang.

- 03.02 Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) hingga proses Penetapan Angka Kredit (PAK), kegiatan uji kompetensi, laporan kegiatan

Uji Kompetensi Nasional, database jabatan fungsional penguji mutu barang.

04 Kelembagaan Standardisasi

04.00 Kelembagaan Standardisasi Nasional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit internal, implementasi kerjasama kelembagaan standardisasi nasional, kaji ulang dokumen dan manajemen sistem mutu, pengelolaan dokumentasi dan informasi publik bidang pengendalian mutu barang, dokumen perencanaan pelaksanaan *survey* kepuasan pelanggan, kegiatan monitoring pemeliharaan sistem mutu.

04.01 Kelembagaan Standardisasi Internasional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi/diseminasi/konsultasi kelembagaan standardisasi internasional, bahan rancangan kebijakan bidang mutu barang dan standardisasi internasional, dokumen kerjasama di bidang standardisasi dan pengendalian mutu lingkup internasional, laporan kegiatan kelembagaan standardisasi internasional.

05 Pengujian Mutu Barang

05.00 Pelayanan Jasa Pengujian

Naskah yang berkaitan dengan dokumen proses pelayanan pengujian.

05.01 Pengembangan Jasa Pengujian

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jasa pengujian, dokumen mutu, rekaman mutu, kaji ulang mutu dokumen, kaji ulang manajemen, sarana pendukung kegiatan pengujian yang sesuai dengan standar nasional/internasional, kegiatan validasi atau verifikasi *software* (pengembangan metode pengujian), melakukan akreditasi laboratorium pengujian.

06 Kalibrasi

06.00 Pelayanan Jasa Kalibrasi

Naskah yang berkaitan dengan dokumen proses pelayanan kalibrasi.

06.01 Pengembangan Jasa Kalibrasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan jasa kalibrasi, dokumen mutu, rekaman mutu, kaji ulang mutu dokumen, kaji ulang manajemen, kegiatan validasi atau verifikasi *software* (pengembangan metode kalibrasi), melakukan akreditasi laboratorium kalibrasi.

07 Sertifikasi

07.00 Pelayanan Jasa Sertifikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sertifikasi produk dan pelayanan sertifikasi personal.

07.01 Pelayanan Pelatihan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pelatihan.

07.02 Pengembangan Jasa Sertifikasi

Naskah yang berkaitan dengan dokumen mutu, kaji ulang manajemen, pengelolaan personil.

07.03 Pelayanan Sertifikasi Produk

Naskah yang berkaitan dengan pengkajian ulang dokumen Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), audit internal LSPro, Perjanjian Kerja Personal, Rapat dewan sertifikasi, penilaian kerja personil evaluasi, evaluasi dan verifikasi sub kontrak.

07.04 Pelayanan Sertifikasi Person

Naskah yang berkaitan dengan kaji ulang dokumen Lembaga Sertifikasi Person (LSP), audit internal LSP, rapat komite skema, pengelolaan kinerja pengujian dan pengawasan.

07.05 Pelayanan Pelatihan

Naskah yang berkaitan dengan kajian ulang dokumen Lembaga Penilaian (LP), Audit Internal LP, dan Pengelolaan Pengajar.

PK. PEMBERDAYAAN KONSUMEN

00 Analisa Perlindungan Konsumen

- 00.00 Konsultasi Perlindungan Konsumen
Naskah yang berkaitan dengan pengaduan konsumen, klarifikasi, tindak lanjut, dan berita acara, pengaduan konsumen yang tidak ditindaklanjuti, permintaan saksi ahli, bimtek sistem pengawasan perlindungan konsumen.
- 00.01 Analisa dan Evaluasi
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan kebijakan Perlindungan Konsumen, bimbingan teknis yang berkaitan dengan mediator bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), peningkatan kualitas penanganan sengketa konsumen.
- 01 Pelayanan Pengaduan Konsumen
 - 01.00 Konsultasi Pengaduan Konsumen
Naskah yang berkaitan dengan konsultasi konsumen dalam rangka perlindungan konsumen.
 - 01.01 Penanganan Pengaduan Konsumen
Naskah yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan Konsumen, hingga tindak lanjut melalui mediasi dan lain sebagainya.
- 02 Jejaring Perlindungan Konsumen
 - 02.00 Dalam Negeri
Naskah yang berkaitan dengan forum dialog dengan perguruan tinggi, dan *stakeholder*.
 - 02.01 Luar Negeri
Naskah yang berkaitan dengan forum pertemuan dengan ASEAN *comittee on consumer protection*, serta forum kerjasama dalam negeri.
- 03 Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha
 - 03.00 Bimbingan Konsumen
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis perlindungan konsumen, penyuluhan perlindungan konsumen, fasilitasi motivator mandiri bagi

masyarakat, pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas.

03.01 Bimbingan Pelaku Usaha

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dan asosiasi perusahaan.

04 Fasilitasi Kelembagaan

04.00 Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi bimbingan teknis bagi sumber daya manusia dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

04.01 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Naskah yang berkaitan dengan Kegiatan pemberdayaan penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bimbingan teknis kepaniteraan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bimbingan teknis sumber daya manusia bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BJ. PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

00 Produk Logam, Mesin dan Elektronika

00.00 Produk Logam dan Mesin

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk logam dan mesin, antara lain: surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

00.01 Produk Elektronika

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk elektronika, antara lain: surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

01 Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka

01.00 Produk Hasil Pertanian

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil pertanian, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

01.01 Produk Hasil Kimia dan Aneka

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil kimia dan aneka, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

02 Jasa

02.00 Jasa Distribusi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa distribusi, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan

hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

02.01 Jasa Bisnis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa bisnis, antara lain surat keputusan, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

03 Petunjuk Teknis Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Naskah yang berkaitan dengan persiapan penyusunan rancangan Petunjuk Teknis (Juknis) pengawasan barang beredar.

04 Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)

04.00 Analisa Kasus Perlindungan Konsumen

Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat apresiasi atau surat teguran, kerangka analisa kasus hasil pengawasan, dan rekomendasi pelimpahan kasus.

04.01 Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)

Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, bimtek terhadap PPBJ dan PPNS-PK.

05 Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

05.00 Penegakan hukum pengawasan produk logam, mesin dan elektronika dan jasa distribusi

Naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan

kegiatan penyidikan, Anatomi Kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha.

05.01 Penegakan Hukum Pengawasan Produk Hasil Pertanian kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Satgas dalam rangka pengawasan terpadu, mulai dari keputusan pembentukan satuan tugas sampai dengan laporan.

MR. METROLOGI

00 Sarana dan Kerja sama

00.00 Sarana Metrologi Legal

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis kepada Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) dan Dinas, Cap Tanda Tera (CTT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan kemetrologian dari UPTD dan Dinas.

00.01 Kerjasama Metrologi Legal

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama baik dalam dan luar negeri di bidang Kemetrologian antara lain nota kesepahaman (MoU) Kerjasama, partisipasi sidang luar negeri, *workshop* kemetrologian negara anggota *Asia pasific Legal Metrology Forum*, dan lain-lain.

00.02 Peraturan Perundang-undangan

Naskah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.

01 Kelembagaan dan Penilaian

01.00 Kelembagaan Metrologi Legal

Naskah yang terkait dengan dokumen mengenai pendirian UPTD, serta monitoring dan evaluasi.

01.01 Penilaian Metrologi Legal

Naskah yang berkaitan dengan *surveillance*, bimbingan teknis, penilaian UPTD, dan penilaian ulang UPTD.

02 Ukuran, Takaran, Timbangan dan Kelengkapannya (UTTP) dan Standar Ukuran

02.00 Besaran Massa, Listrik, Tekanan, dan Suhu

Naskah yang berkaitan dengan dokumen rekomendasi barang contoh, barang tidak wajib izin tipe dan database.

02.01 Besaran Arus, Panjang, dan Volume

Naskah yang berkaitan dengan dokumen rekomendasi barang contoh, barang tidak wajib izin tipe, dan database.

02.02 Izin Tipe

Naskah yang berkaitan dengan dokumen izin tipe dan database.

02.03 Izin Tanda Pabrik

Naskah yang berkaitan dengan dokumen izin tanda pabrik dan database.

02.04 Label Tipe

Naskah yang berkaitan dengan dokumen label tipe dan database.

03 Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrolgian

03.00 Penera dan Pranata Laboratorium Kemetrolgian

Naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, keputusan tentang penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi Jabatan fungsional sumber daya manusia kemetrolgian, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/*in-house* seminar jabatan fungsional.

03.01 Pengamatan Tera dan Pengawas Kemetrolgian

Naskah yang berkaitan dengan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian PPNS Metrologi Legal, pendidikan dan pelatihateknis dan fungsional, peraturan di bidang jabatan fungsional sumber daya manusia kemetrolgian, standar kompetensi jabatan fungsional sumber daya manusia kemetrolgian, database, serta evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional.

- 04 Penegakan Hukum dan Bimbingan Operasional Kemetrolgian
- 04.00 Pengawasan UTTP
- Naskah yang berkaitan dengan daerah tertib ukur, pasar tertib ukur, pengawasan dan penegakan hukum terhadap UTTP, penelaahan kasus untuk penelaahan UTTP.
- 04.01 Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional
- Naskah yang berkaitan dengan forum pengawasan kemetrolgian, peredaran BDKT, pengawasan dan penegakan hukum terhadap BDKT, penelaahan kasus untuk pengawasan BDKT, dan lain-lain.
- 04.02 Penyuluhan dan Bimbingan Operasional Kemetrolgian
- Naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis, *workshop*/seminar di bidang Metrologi Legal, pemahaman penyebaran informasi melalui media cetak, bimtek dan sosialisasi UTTP dan BDKT, dan lain-lain.
- 05 Balai Satuan Nasional Standar Ukuran (SNSU)
- 05.00 Bimbingan Mutu
- Naskah yang berkaitan dengan dokumen sistem mutu, rekaman sistem mutu, Rekaman pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukur Besaran Massa dan Panjang, sertifikat kalibrasi standar, peraturan standar internasional/standar nasional, laporan kegiatan, dan sertifikat akreditasi.
- 05.01 Pelayanan Teknis
- Naskah yang berkaitan dengan rekaman teknis kalibrasi dan verifikasi, serta rekaman teknis yang didigitalisasi.
- 06 Pengujian Alat UTTP
- 06.00 Bimbingan Mutu
- Naskah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pengembangan mutu laboratorium, pengembangan metode pengukuran, pengujian UTTP, untuk mendapatkan akreditasi dan sertifikasi dari Badan Akreditasi : komite akreditasi nasional

06.01 Pelayanan Teknis

Naskah yang berkaitan dengan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe, dan izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP penanganan khusus didalam maupun diluar kantor.

07 Standardisasi Metrologi Legal

07.00 Bimbingan Kemetrolgian

Naskah yang berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan metrologi legal, dan pendataan potensi UTTP, sosialisasi metrologi bagi kabupaten/kota, fasilitasi pegawai berhak, fasilitasi pengamat tera, *upgrading* ilmu kemetrolgian, fasilitasi daerah tertib ukur/pasar tertib ukur, monitoring penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium, dan bimbingan teknis kemetrolgian.

07.01 Pelayanan Kemetrolgian

Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tera dan/tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP, verifikasi standar satuan ukuran, uji banding lab metrologi pemerintah daerah, peningkatan/evaluasi manajemen mutu laboratorium, serta dukungan tugas pokok dan fungsi.

TN. TERTIB NIAGA

00 Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)

00.00 Pengawasan Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup).

00.01 Pendaftaran Barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup)

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup).

01 Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)

01.00 Analisa Kasus Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kasus perdagangan.

01.01 Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan).

02 Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Perdagangan Lainnya

02.00 Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum perizinan perdagangan dalam negeri dan perdagangan lainnya.

02.01 Seksi Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum perizinan perdagangan luar negeri.

03 Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur

03.00 Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum distribusi barang pokok dan penting.

03.01 Penegakan Hukum Distribusi Barang yang Diatur

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum distribusi barang yang diatur, termasuk barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup).

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PM. PERUNDINGAN MULTILATERAL

00 Perundingan

00.00 Persiapan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan rapat persiapan perundingan, keputusan tentang pembuatan tim, materi sidang, laporan kegiatan dan program kerja mengenai perundingan.

00.01 Pelaksanaan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil perundingan, serta brafaks hasil sidang serta laporan.

- 00.02 Pasca Perundingan
Naskahyang berkaitan dengan laporan *working group*, *workshop*, dan *Policy Dialogue*, serta dokumen proses ratifikasi fasilitasi perdagangan dan dokumen asli protokol perjanjian.
- 00.03 Hasil Ratifikasi
Naskahyang berkaitan dengan hasil ratifikasi (Rancangan Keputusan Presiden).

- 01 Penanganan Sengketa
 - 01.00 Persiapan Penanganan Sengketa
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat persiapan perundingan, serta materi sidang.
 - 01.01 Pelaksanaan Penanganan Sengketa
Naskah yang berkaitan dengan pembahasan penganganan masalah sengketa dan juga laporan mengenai hasil penanganan sengketa.
 - 01.02 Pasca Penanganan Sengketa
Naskah yang berkaitan dengan laporan *workshop* dan *policy dialogue*.

- 02 Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan peninjauan ketentuan perdagangan dan juga proses notifikasinya.

- 03 Akses Pasar (Barang Pertanian dan Non Pertanian)
Naskah yang berkaitan dengan tarif barang dan non tarif barang.

- 04 Instrumen Perdagangan (Revisi dari Multilateral)
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Instrumen Perdagangan.

- 05 Hak Kekayaan Intelektual, investasi, lingkungan dan pembangunan
Naskah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan juga isu baru serta lingkungannya.

PA. PERUNDINGAN ASEAN

00 Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN (Akses Pasar dan Kepabeanan)

00.00 Persiapan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang.

00.01 Pelaksanaan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang.

00.02 Laporan Hasil Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain).

00.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan.

01 Investasi Usaha Kecil dan Menengah dan daya saing isu-isu ASEAN

01.00 Persiapan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang terkait Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.

01.01 Pelaksanaan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait investasi, usaha kecil, dan menengah, daya saing dan isu-isu ASEAN.

01.02 Laporan Hasil Sidang Perundingan (revisi Dir. ASEAN)

Naskah yang berkaitan dengan laporan laporan hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.

- 01.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.

- 02 ASEAN Mitra Dialog
 - 02.00 Persiapan Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang.
 - 02.01 Pelaksanaan Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang.
 - 02.02 Laporan Hasil Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain).
 - 02.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan mitra dialog.

- 03 Kerja sama Antar dan Sub Regional
 - 03.00 Persiapan Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding dan juga materi sidang.
 - 03.01 Pelaksanaan Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan, dan laporan hasil perundingan.
 - 03.02 Laporan Hasil Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.
 - 03.03 Tindaklanjut Hasil Perundingan
Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan.

- 04 Proses Ratifikasi *Agreement*
Naskah yang berkaitan dengan proses ratifikasi *agreement*.

- 05 Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN
Naskah yang berkaitan dengan Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah.

AO. APEC DAN ORGASNISASI INTERNASIONAL

00 Perundingan APEC

00.00 Persiapan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding, serta materi sidang.

00.01 Pelaksanaan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.

00.02 Laporan Hasil Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.

00.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.

01 Badan-badan PBB dan Non PBB

Naskah yang berkaitan dengan hasil sidang Badan-badan PBB dan Non PBB, proses ratifikasi, dan hasil ratifikasi.

02 Organisasi Komoditi Internasional

02.00 Perundingan Organisasi Komoditi

Naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.

02.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang

Naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.

02.02 Data Komoditi Internasional

Naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.

03 Diseminasi Hasil Perundingan APEC dan Organisasi Internasional

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi.

PB. PERUNDINGAN BILATERAL

00 Pra Perundingan

00.00 Persiapan

Naskah yang berkaitan dengan persiapan perundingan seperti kertas posisi, agenda, dan lain-lain.

00.01 Draft Perjanjian

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan draft perjanjian sampai draft tersebut tersusun.

01 Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan perundingan meliputi *trade agreement*, *MoU*, *Joint Statement*, *Agreed Minutes*, dan *Preferential Trade Agreement*. FTA, CEPA, ECA, BTMF, Sub.Mission on GSP dan sebagainya.

02 Pasca Perundingan

02.00 Konsultasi Publik di Pusat dan Daerah

Naskah yang berkaitan dengan proses dan laporan kegiatan.

02.01 Proses Ratifikasi

Naskah yang berkaitan dengan naskah penjelasan, rancangan peraturan presiden, terjemahan serta naskah perjanjian.

PJ. PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

00 Jenis Perundingan Jasa (Jasa Bisnis, Jasa distribusi, dan keuangan, Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, Jasa pendidikan dan kesehatan, Jasa komunikasi, lingkungan, dan energi, Jasa transportasi dan logistik.

00.00 Persiapan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang terkait

IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.

00.01 Pelaksanaan Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.

00.02 Laporan Hasil Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.

00.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan

Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, ASEAN-Jepang, Multilateral (WTO), IE-CEPA, Indonesia-Taiwan.

01 *Rules*, peraturan *domestic* dan penyusunan analisis informasi

Naskah yang berkaitan dengan peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi terkait jasa bisnis, jasa distribusi, jasa keuangan, jasa konstruksi, jasa pariwisata, jasa rekreasi budaya dan olahraga, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa lingkungan, jasa energi, jasa transportasi, jasa logistik, jasa *e-commerce*.

02 Konsultasi Publik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi publik seperti *Workshop*, *Focus Group Discussion*, *Dialog Series*, dan

lain-lain terkait *workshop*, *Focus Group Discussion*, *Dialogue series*, konsultasi Publik, rapat koordinasi.

E. DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

IE. PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR

00 Pengembangan Pasar Ekspor

00.00 Analisa Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan *Market Inteligent*, survei data dan lapangan, *Market Brief* penyedia informasi ringkas pasar tujuan ekspor, laporan hasil kegiatan, serta peta pasar tujuan ekspor.

00.01 Penyebarluasan Informasi dan Peluang Pasar Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan laporan hasil penyebarluasan informasi dan peluang pasar ekspor.

01 Pengembangan Sistem Informasi Ekspor

01.00 Pengelolaan Data Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemutakhiran data serta neraca perdagangan dan analisis informasi ekspor.

01.01 Sistem Informasi Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, situs *website*, termasuk implementasi aplikasi *online*, bimbingan teknis, *membership* sistem dan promosi *online*, data member serta pengelolaan jaringan informasi.

02 Pelayanan Informasi Ekspor

02.00 Pelayanan Pelaku Usaha

Naskah yang berkaitan dengan *customer service center* data pelaku usaha, *Gathering*, *permanent trade display*, *inquiry*, dan juga pemberian penghargaan primaniyarta dan primaduta.

02.01 Publikasi Informasi Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan publikasi informasi ekspor berupa *leaflet*, brosur, dan lain-lain.

PE. PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

00 Hasil Industri Manufaktur (mesin, logam, elektronik dan telematika, pangan, TPT, alat kesehatan, dan aneka).

00.00 Identifikasi

Naskah yang berkaitan dengan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial, pengamatan produk ekspor di negara pesaing serta laporan hasil identifikasi.

00.01 Pengembangan Produk

Naskah yang berkaitan dengan adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk ekspor, profil produk, katalog, *rebranding*, partisipasi pada peningkatan daya saing produk ekspor, serta pengembangan produk kerajinan dan partisipasi pada pengembangan produk kreatif.

00.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual.

00.03 Pengembangan Desain

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi *designer dispatch services (DDS)*, pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, *workshop* desain, desain *award*.

01 Produk Agro

01.00 Identifikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.

01.01 Pengembangan Produk

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, *rebranding*, dan lain-lain.

01.02 Pengembangan Desain

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi *designer dispatch services (DDS)*,

pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, *workshop* desain, desain *award*.

02 Jasa (jasa bisnis dan profesi, konstruksi dan distribusi)

02.00 Identifikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.

02.01 Pengembangan Produk

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, *rebranding*.

02.02 Pengembangan Desain

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi *designer dispatch services (DDS)*, pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, *workshop* desain, desain *award*.

03 Produk Kreatif (media dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan desain).

03.00 Identifikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.

03.01 Pengembangan Produk

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, *rebranding*.

03.02 Pengembangan Desain

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi *designer dispatch services (DDS)*, pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, *workshop* desain, desain *award*.

KE. KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR

00 Luar Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)

00.00 MoU/Perjanjian Kerja Sama

- Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian pengembangan ekspor hingga pelaporan.
- 00.01 Aktivasi/diseminasi Implementasi Hasil Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi pengembangan ekspor hingga pelaporan.
- 00.02 Monitoring dan Evaluasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.
- 01 Dalam Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)
- 01.00 Identifikasi Kerjasama Pengembangan Ekspor
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.
- 01.01 Mou/Perjanjian Kerja Sama
Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian kerja sama dalam negeri hingga pelaporan.
- 01.02 Aktivasi/Diseminasi Implementasi Hasil Kerjasama Pengembangan Ekspor
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi implementasi hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.
- 01.03 Monitoring dan Evaluasi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.

PC. PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA

- 00 Promosi Dagang (Dalam Negeri dan Luar Negeri)
- 00.00 Partisipasi Pameran Dagang
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi pameran dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil pameran.

- 00.01 Partisipasi Misi Dagang
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil misi dagang.
- 00.02 Partisipasi Misi Pembelian
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi pembelian mulai dari koordinasi perwakilan luar negeri sampai pembuatan laporan hasil misi pembelian.
- 00.03 Sosialisasi Promosi
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi promosi mulai dari survei ke calon peserta sampai pembuatan laporan hasil sosialisasi promosi.

01 Pencitraan

- 01.00 Perencanaan
Naskah yang berkaitan dengan pembuatan video *nation branding*, *Focus Group Discussion*, pembuatan video peningkatan citra produk indonesia, serta laporan hasil kegiatan.
- 01.01 Penerapan Citra
Naskah yang berkaitan dengan penerapan citra, yaitu pembuatan video *nation branding* dan lain-lain, pembuatan kit promosi serta laporan hasil kegiatan.
- 01.02 Pemantauan dan Evaluasi
Naskah yang berkaitan dengan kuesioner pemantauan dan evaluasi, serta laporan hasil kegiatan.

DE. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR INDONESIA

- 00 Perencanaan/Persiapan Diklat Ekspor
 - 00.01 Analisis Kebutuhan
Naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan ekspor.
 - 00.02 Pengembangan Kurikulum
Naskah yang berkaitan dengan persiapan bahan pelaksanaan pengembangan metodologi dan kurikulum.

00.03 Promosi dan Publikasi

Naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan promosi, publikasi, dan hubungan masyarakat.

00.04 Kerjasama dan Pelayanan Jasa

Naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kerjasama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring, peningkatan kompetensi sumber daya manusia ekspor, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni.

01 Penyelenggaraan Diklat Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.

02 Monitoring dan Evaluasi Diklat Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor.

03 Database Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan database tenaga pengajar.

04 Database peserta pelatihan

Naskah yang berkaitan dengan database Peserta pelatihan pendidikan dan pelatihan ekspor.

F. BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA DAN KOMODITI

UD. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN

00 Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

00.00 Rancangan Undang-undang

Naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.

00.01 Rancangan Peraturan Pemerintah

Naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.

- 00.02 Rancangan Peraturan Presiden
Naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.
 - 00.03 Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
Naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan mulai dari rancangan awal sampai ditetapkan.
 - 00.04 Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi
Naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.
- 01 Pelayanan Hukum
- 01.00 Penegakan Hukum
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan, kegiatan penyidik PPNS, berkas administrasi serta penyegaran PPNS.
 - 01.01 Pemberian Pelayanan Hukum
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum serta asistensi hukum terhadap pengaduan.
 - 01.02 Penanganan Perkara
Naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan/gugatan/Laporan kepolisian, pra peradilan, perdata, tata usaha negara, arbitrase.
- 02 Penindakan Pelanggaran
- 02.00 Pelanggaran Ilegal
Naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Ilegal.
 - 02.01 Pelanggaran Legal
Naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Legal.

PF. PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK

00 Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

00.00 Pengawasan Transaksi Bursa Berjangka

Naskah yang berkaitan dengan laporan transaksi harian, mingguan dan bulanan pelaku usaha PBK, proses pemeriksaan dan analisa transaksi bursa berjangka pelaku usaha PBK, laporan hasil pengawasan dan koordonasi internal terkait pengenaan sanksi.

00.01 Data Transaksi Bursa Berjangka

Naskah yang berkaitan dengan data transaksi bursa berjangka seperti jumlah, volume, nilai transaksi, data pelaku usaha PBK, data kontrak komoditi, dan lain-lain).

00.02 Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pelaku usaha PBK meliputi data transaksi, analisa data, laporan hasil pengawasan, proses penyampaian LHP ke pelaku usaha dan koordniasi internal terkait pengenaan sanksi.

00.03 Pengawasan Transaksi Pasar Fisik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pasar fisik meliputi data harga komoditi, data spesifikasi kontrak komoditi, analisa data, rekomendasi kelayakan lokasi serah terima fisik, laporan hasil pengawasan.

01 Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

01.00 Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan laporan keuangan pelaku usaha PBK meliputi data laporan keuangan pelaku usaha PBK, rekapitulasi penyampaian data laporan keuangan, analisa laporan keuangan, laporan hasil evaluasi/pengawasan dan proses pengenaan sanksi denda.

01.01 Pengawasan Pialang Berjangka

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pialang berjangka meliputi Data Pialang Berjangka,

Identifikasi dan pemeriksaan data/tabel kesesuaian laporan, Matriks keterlambatan, Hasil analisa, Laporan hasil pemantauan dan evaluasi, Koordinasi dengan unit terkait (Tindak lanjut), Himbauan kepada pelaku yang belum/terlambat menyampaikan laporan, Laporan hasil pengawasan.

01.02 Pengawasan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan laporan tahunan pelaku usaha PBK meliputi data laporan tahunan pelaku usaha PBK, Matriks Kesesuaian Laporan, Hasil pemantauan dan evaluasi, Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi, Himbauan terhadap pelaku usaha yang belum/terlambat menyampaikan laporan, Laporan Hasil Pengawasan Laporan Tahunan.

02 Audit Pelaku Usaha PBK

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan audit terhadap pelaku usaha PBK mulai dari surat pemberitahuan audit rutin sampai kepada pembuatan laporan hasil audit termasuk rekomendasi hasil audit.

BP. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

00 Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi (pelaku pasar dan kelembagaan)

00.00 Pemberian Izin Usaha dan Persetujuan Perdagangan Berjangka Komoditi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian izin usaha pialang berjangka, pedagang berjangka, bursa berjangka, kliring berjangka, pemberian izin wakil pialang berjangka dan persetujuan PBK: bank penyimpan margin, persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, persetujuan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), persetujuan peserta SPA, persetujuan perubahan alamat pelaku usaha PBK, pemberian perubahan nama pelaku usaha PBK, persetujuan pialang untuk penyaluran amanat nasabah

bursa luar negeri, persetujuan perubahan pengurus/pemegang saham pelaku usaha PBK, persetujuan pemberhentian direktur kepatuhan, persetujuan untuk melakukan kegiatan promosi/iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang PBK, mulai dari proses awal sampai akhir.

00.01 Pencabutan Izin Pelaku Usaha dan Kelembagaan

Naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan izin pelaku usaha dan kelembagaan.

00.02 Database Pelaku Usaha PBK

Naskah yang berkaitan dengan Database Pelaku Usaha PBK.

00.03 Pelatihan Teknis/*Workshop/Sosialisasi/Focus Group Discussion* bagi pelaku usaha PBK

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan teknis dan lain-lain bagi pelaku usaha PBK.

00.04 Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Uji Profesi wakil pialang berjangka.

01 Pengembangan Pasar

01.00 Pemberian Persetujuan

Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian persetujuan mulai dari persetujuan peraturan dan tata tertib (PTT) bursa dan lembaga sampai persetujuan kontrak berjangka.

01.01 Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK dan Sistem Resi Gudang (SRG)

Naskah yang berkaitan dengan analisis pengembangan kelembagaan dan produk PBK dan SRG serta kegiatan pertemuan teknis, Focus Group Discussion.

02 Pengembangan Data dan Teknologi Informasi

01.02 Pengembangan Data

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan data seperti statistik harga komoditi dan harga berjangka, data harga komoditi, data harga bursa berjangka, dan pengelolaan sistem informasi harga komoditi.

01.03 Teknologi Informasi

Naskah yang berkaitan dengan panduan pengguna aplikasi serta *Lisensi software windows server*.

03 Monitoring dan Evaluasi Harga Komoditi Pasar Berjangka dan Fisik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan pasar.

PR. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PASAR LELANG KOMODITAS (PLK)

00 Pembinaan SRG

Naskah yang berkaitan dengan proses pembinaan SRG/Pemberian Persetujuan meliputi persetujuan pengelola gudang SRG, persetujuan gudang, persetujuan lembaga penilai kesesuaian.

01 Pengawasan SRG

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan SRG meliputi pengawasan terhadap gudang dan pengelola gudang, pengawasan terhadap bank penyalur pembiayaan skema resi gudang, database transaksi dan kelembagaan SRG sampai pembuatan laporan hasil pengawasan.

02 Pembinaan dan Pengawasan PLK

02.00 Pembinaan PLK

Naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan penyelenggara PLK, serta pemberian persetujuan lembaga penjamin pasar lelang.

02.01 Pengawasan PLK

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penyelenggaraan PLK meliputi tertib administrasi, tata cara pelaksanaan PLK, data transaksi dan realisasi pasar lelang komoditas serta laporan hasil pengawasan.

03 Bimbingan teknis/Sosialisasi/*Workshop*

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis PLK dan SRG, sosialisasi, workshop, dan lain-lain.

04 Monitoring dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi PLK dan SRG.

G. KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

AD.KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

00 Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi

Naskah yang berkaitan dengan Pembuktian Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri.

01 Penyelidikan Pembuktian Kerugian

Naskah yang berkaitan dengan Pembuktian kerugian industri dalam negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri.

02 Pengumpulan, Penelitian, dan Pengolahan Bukti dan Informasi Terkait dengan Penyelidikan Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi

Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.

- 03 Pembuatan rekomendasi pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk

Naskah yang berkaitan dengan Pembuatan rekomendasi pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan kepada Menteri.

- 04 Pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan Antidumping dan Subsidi

Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan Antidumping dan Subsidi.

H. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

PI. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

- 00 Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan

Naskah yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dan pertambangan dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diselidiki sebagai akibat lonjakan jumlah impor.

- 01 Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Naskah yang berkaitan dengan Penyelidikan terhadap kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diselidiki sebagai akibat lonjakan jumlah impor.

- 02 Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan.

Naskah yang berkaitan dengan Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan

Sektor Industri, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

- 03 Pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan
Naskah yang berkaitan dengan Pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan kepada Menteri Perdagangan.
- 04 Pelaksanaan Rekomendasi Pengenaan Tindakan Pengamanan
Naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan rekomendasi pengenaan tindakan pengamanan kepada Menteri Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

